BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Peserta Didik

1. Pengertian manajemen peserta didik

Istilah "manajemen peserta didik" merupakan gabungan dari kata "manajemen" dan "peserta didik". Kata *manajemen* merupakan terjemahan dari *management* (Bahasa Inggris), juga berasal dari bahasa Latin, Prancis, dan Italia yaitu *mano, manage/menege* dan *maneggiare* berarti melatih kuda agar dapat melangkah dan menari seperti yang dikehendaki pelatihnya. Sahertian dalam bukunya menjelaskan dalam pengertian manajemen terkandung dua kegiatan, yaitu pikir (*mind*) dan kegiatan tindak laku (*action*).[1] Harold Koontz dan Cyryl O. Donel mendefinisikan "Manajemen sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain". Sedangkan menurut Hasibuan seperti yang dikutip oleh Badrudin dalam bukunya, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.[2] Sedangkan G. R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan

[1] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*…, 4.
[2] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber daya lainnya. Siagian mendefinisikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan. Di lain pihak, The Liang Gie memberikan batasan manajemen sebagai segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang atau mengarahkan segala fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.[3] Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang di dalamnya menjalankan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan mempergunakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material secara efektif dan efisien.

Peserta didik diartikan sebagai individu yang tidak tergantung pada orang lain atau seorang pribadi yang menentukan diri sendiri.[4] Abu Ahmadi juga berpendapat bahwa peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi (manusia seutuhnya). Individu diartikan "Orang yang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri".[5] Sedangkan peserta didik, menurut Suharsimi Arikunto adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan.[6] Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, "Peserta didik adalah anggota masyarakat

[3] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*…, 4.
[4] Tim Dosen, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam…,* 64.
[5] Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 205.
[6] Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Kelas dan Siswa: Sebuah Pendekatan Evaluatif,* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu".[7] Menurut Oemar Hamalik, peserta didik merupakan suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.[8] Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah individu yang merupakan suatu komponen pendidikan yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya sesuai minat dan bakatnya agar menjadi manusia yang berkualitas.

Dari kedua kata pembentuk manajemen dan peserta didik tersebut, terdapat beberapa pendapat ahli tentang konsep manajemen peserta didik. Diantaranya:

a. Suryosubroto memberi batasan definisi mengenai manajemen peserta didik yaitu pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan pencatatan murid, semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah/madrasah, karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah/madrasah itu.[9]
b. E. Mulyasa mendefinisikan, pengembangan peserta didik atau manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluar sekolah sehingga

[7] Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
[8] Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 3.
[9] B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik secara optimal.[10]

c. Menurut Badrudin dalam bukunya mendefinisikan manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik sejak peserta didik masuk sekolah sampai keluar dari sekolah sehingga dapat membantu kelancaran pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.[11]

d. Mulyono dalam bukunya mendefinisikan manajemen peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga bersangkutan agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.[12]

e. Tim Dosen Adpen UPI mendefinisikan, manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik sejak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan tersebut.[13]

f. Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, mendefinisikan manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan

---

[10] E. Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 69.

[11] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 23.

[12] Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan,* (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2008), 178.

[13] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan peserta didik mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga.[14]

g. Mujamil Qomar mendefinisikan, manajemen peserta didik adalah pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari awal masuk (bahkan sebelum masuk) hingga akhir (tamat) dari lembaga pendidikan.[15]

h. Tim Dosen MPI UIN Sunan Ampel mendefinisikan, manajemen peserta didik merupakan suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang baik.[16]

i. Sedangkan Knezevich dalam Prihatin mengartikan manajemen peserta didik (*pupil personnel administration*) sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan peserta didik di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai peserta didik matang di sekolah.[17]

Dari beberapa pendapat beberapa ahli di atas dapat ditegaskan bahwa manajemen peserta didik adalah seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan sedemikian rupa oleh sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan pada

[14] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 23.
[15] Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2007), 141.
[16] Tim Dosen, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam…,* 64.
[17] Eka Prihatin, *Manajemen Peserta Didik,* (Bandung:Alfabeta, 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta didik guna membina peserta didik sejak awal masuk hingga lulus dari sekolah sehingga peserta didik dapat berkembang semaksimal mungkin.

2. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik

Dalam bukunya Badrudin menjelaskan bahwa tujuan manajemen peserta didik secara umum adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran di sekolah/madrasah sehingga proses pembelajaran berjalan lancar, tertib, teratur, dan dapat memberikan konstribusi bagi pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan sekolah/madrasah secara efektif dan efisian.[18] Sedangkan menurut Mujamil Qomar dalam bukunya, tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, serta mampu mencapai tujuan pendidikan sekolah.[19] Sedangkan menurut Tim Dosen UPI, tujuan manajemen pelayanan peserta didik yaitu mengatur kegiatan peserta didik agar dapat menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan (sekolah) sehingga dapat berjalan, tertib, dan teratur agar dapat memberikan konstribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan.[20] Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur segala kegiatan yang dapat menunjang proses

[18] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 24.
[19] E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 42.
[20] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan pada peserta didik agar lebih tertib dan lancar sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan.

Adapun tujuan khusus dari manajemen peserta didik adalah[21]:

a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik.
b. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan), bakat, dan minat peserta didik.
c. Menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik.
d. Peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka.

Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individual, sosial maupun akademik.[22] Menurut Badrudin dalam bukunya, fungsi manajemen peserta didik sebagai wahana dalam mengembangkan diri peserta didik seoptimal mungkin baik yang berkenaan dengan individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi peserta didik lainnya.[23] Sementara itu fungsi khusus dari manajemen peserta didik adalah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, pengembangan fungsi sosial peserta didik, penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, serta fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik.[24] Berdasarkan hal

[21] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 24.
[22] Tim Dosen, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam…,* 65.
[23] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 24.
[24] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*…, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai tempat/wadah bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya baik secara personal, sosial, maupun akademik.

Dengan demikian secara umum tujuan dan fungsi manajemen peserta didik saling berkaitan yang pada dasarnya dalam rangka untuk mendidik peserta didik dan mengembangkan segi kepribadian, pengetahuan, keterampilan, sosial peserta didik yang nantinya berguna untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah.[25]

3. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik

Prinsip adalah sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas.[26] Prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka *memanage* peserta didik, prinsip-prinsip yang ada haruslah dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan manajemen peserta didik. Ada beberapa prinsip dalam manajemen peserta didik, diantaranya[27]:

a. Harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
b. Dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen kelembagaan.
c. Kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman latar belakang dan perbedaan untuk kemudian diarahkan agar saling memahami dan saling menghargai.

[25] Hega Raka Ardana, *Manajemen Peserta Didik Sekolah Inklusi …,* 29.
[26] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 25.
[27] Tim Dosen, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kegiatan dalam manajemen peserta didik diarahkan sebagai upaya dalam mengatur perkembangan potensi peserta didik.
e. Segala kegiatan dalam manajemen peserta didik harus dapat mendorong serta memacu kemandirian peserta didik.
f. Kegiatan manajemen peserta didik harus dapat berjalan secara fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah maupun pada masa depannya.

Depdiknas, mengemukakan prinsip dasar dalam manajemen peserta didik, diantaranya[28]:

a. Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek bukan sebagai objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mereka.
b. Kondisi siswa sangat beragam ditinjau dari segi fisik, intelektual, sosial ekonomi, minat, bakat, dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan wahana yang beragam yang dapat mengembangkan setiap peserta didik secara optimal.
c. Peserta didik akan termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang mereka kerjakan.
d. Pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik,[29] bahkan metakognitif.

[28] Depdiknas, *Panduan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: 2000), 87.
[29] *Panduan Manajemen Sekolah*, (TEP: Direktorat Pendidikan Menengah Depdikbud, 1998), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat tentang prinsip manajemen peserta didik di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasi manajemen peserta didik di suatu lembaga pendidikan, harus melaksanakan kegiatan manajemen peserta didik sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Sesuai peraturan yang berlaku; (2) Merupakan bagian dari komponen manajemen pendidikan secara menyeluruh; (3) Dapat menciptakan kegiatan yang dapat menunjang perkembangan potensi peserta didik secara menyeluruh tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik.

4. Ruang lingkup manajemen peserta didik

Dalam manajemen peserta didik terdapat beberapa ruang lingkup. Yang dimaksud ruang lingkup disini adalah segala pengaturan aktivitas-aktivitas peserta didik sejak yang bersangkutan masuk ke sekolah hingga yang bersangkutan lulus, baik yang berkenaan dengan peserta didik secara langsung, maupun yang berkenaan dengan peserta didik secara tidak langsung (tenaga kependidikan, sumber-sumber pendidikan, prasarana dan sarananya).[30] Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi perencanaan peserta didik, pengorganisasian peserta didik, pelaksanaan pembinaan peserta didik, pengawasan peserta didik, serta evaluasi peserta didik.

[30] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah…*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pendidikan Inklusi

1. Pengertian pendidikan inklusi

Istilah inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*inclusion*" yang berarti terbuka. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 1. Sehingga penggabungan dari dua kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara terbuka bagi seluruh peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, emosional, dan intelektualnya guna mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang menggabungkan antara peserta didik normal dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Seperti yang dikemukakan oleh Stainback bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama.[31] UNESCO juga mengemukakan bahwa: "*inclusive education is a developmental approach*

[31] Tarmansyah, *Inklusi Pendidikan untuk Semua,* (Jakarta: Dediknas, 2007), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seeking to address the learning needs of all children, youth and adults with a specific focus on those who are vulnerable to marginalization and exclusion". Mengartikan pendidikan inklusi adalah sebuah pendekatan yang berhubungan dengan pengembangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belajar seluruh anak tanpa ada perbedaan dan pemisahan. Sistem pendidikan ini memberikan hak yang sama kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan potensinya.[32] Sedangkan J. David Smith mengemukakan bahwa pendidikan inklusi merupakan suatu pendidikan bagi peserta didik yang mengalami hambatan agar tiap anak dapat terlibat sebenarnya dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi yang ada di sekolah.[33] Sekolah Inklusi menyediakan tempat bagi setiap peserta didik untuk dapat diterima dan menjadi bagian dari sekolah dengan menyediakan pendidikan yang layak dan bermutu, menantang, akan tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik.[34]

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar pada seluruh lapisan peserta didik, tanpa membedakan peserta didik berdasarkan kondisi fisik, sosial, emosional, dan intelektualnya. Sekolah ini menyediakan pendidikan yang layak dan menantang tetapi disesuaikan dengan setiap kemampuan dan kebutuhan peserta didiknya tanpa adanya unsur diskriminasi di dalamnya.

---

[32] Lay Kekeh Marthan, *Manajemen Pendidikan Inklusi*. (Jakarta: DIRJEN DIKTI, 2007), 143.
[33] J. David Smith, *Inklusi: Sekolah Ramah…*, 45.
[34] Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *Mengenal Pendidikan Terpadu*, Buku 1 (Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan pendidikan inklusi

Untuk memudahkan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang keberadaannya menyebar di seluruh pelosok pedesaan dan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelajaran di SLB, sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sangat mendukung untuk membantu pelayanan peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Dengan demikian, dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat berinteraksi dengan anak normal pada umumnya baik dalam mengikuti pendidikan maupun dalam beradaptasi dengan lingkungannya.

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan inklusi di Indonesia. Diantaranya:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
2. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar.
3. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.
4. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.
5. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan", dan ayat 2 yang berbunyi "Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga Negara yang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 51 yang berbunyi "Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan luar biasa".[35]

[35] Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan…, 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, UNESCO (1994) mengemukakan bahwa:

> *" At the core of inclusive education is the human right to education, pronounced in the Universal Declaration of Human Rights in 1949. Equally important is the right of children not to be discriminated against, stated in Article 2 of the Convention on the Right of the Child (UN, 1989). A logical consequence of this right is that all children have the right to receive the kind of education that does not discriminate on grounds of disability, ethnicity, religion, language, gender, capabilities, and so on."*[36]

Pendidikan inklusi merupakan inti dari hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan. Hal ini telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia di tahun 1949. Kesamaan kepentingan adalah hak anak untuk tidak didiskriminasikan, dinyatakan dalam Pasal 2 dari Konvensi tentang hak anak. Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, gender, kapabilitas dan lain sebagainya. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusi adalah untuk memenuhi hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang perbedaan kondisi fisik, ras, agama, bahasa dan sebagainya dalam mengenyam pendidikan.

3. Landasan pendidikan inklusi

a. Landasan filosofis

Landasan filosofis pendidikan inklusi adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia dan falsafah bangsa Indonesia. Filsafat ini merupakan

[36] Hega Raka Ardana, *Manajemen Peserta Didik Sekolah Inklusi* …, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengakuan atas kebhinekaan yang ada di Indonesia. Kebhinekaan adalah sikap persatuan meskipun adanya perbedaan suku, ras, agama, budaya maupun kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi berangkat dari filosofi inilah, pendidikan yang ada harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi peserta didik yang positif dan beragam, sehingga akan muncul sikap saling asah, asih dan asuh.[37]

b. Landasan yuridis

Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam pelaksanaan pendidikan tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa.[38]

c. Landasan pedagogis

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 yaitu berkembangnya potensi seorang peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

[37] Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *Mengenal Pendidikan Terpadu*…, 11.

[38] Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan…, 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Jadi melalui pendidikan seorang peserta didik di bangsa ini dapat dididik dan diajarkan untuk mengembangkan segala potensinya. Seorang peserta didik tidak mungkin dapat bersosialisasi dan menjadi warga negara yang baik jika peserta didik tersebut tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berada dalam masyarakat yang sangat plural. Sebaiknya peserta didik berkebutuhan khusus harus diberikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan cara memasukan mereka ke dalam kelas reguler agar dapat dibentuk menjadi individu-individu yang menghargai adanya perbedaan.[39]

d. Landasan empiris

Berbagai penelitian dilakukan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusi telah banyak dilakukan di berbagai negara terutama negara barat yang dipelopori oleh *the National Academy of Sciences* (Amerika serikat) sejak pada tahun 1980-an. Hampir keseluruhan hasil penelitian itu menghasilkan kesimpulan bahwa pendidikan inklusi jauh lebih baik daripada pendidikan khusus secara segregatif. Para peneliti merekomendasikan bahwa pendidikan khusus hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat.[40]

---

[39] Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *Mengenal Pendidikan Terpadu* …, 11.
[40] *Ibid*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landasan empiris lainnya diantaranya:

a. Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 (*Declaration of Human Rights*).
b. Konvensi Hak Anak, 1989 (*Convention on the Rights of the Child*).
c. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990 (*World Conference on Education for All*).
d. Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi Orang Berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities*).
e. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, 1994 (*the Salamanca Statement on Inclusive Education*).
f. Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua, 2000 (*the Dakar Commitment on Educational for All*) dan
g. Deklarasi Bukittinggi (2005).[41]

Melalui pendidikan inklusi, diharapkan sekolah regular dapat memberikan pelayanan kepada semua anak dengan tidak memandang latar belakang kemampuan peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Pendidikan inklusi mendidik anak berkebutuhan khusus bersama-sama anak pada umumnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki.[42] Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di lingkungan masyarakat terdapat anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu komunitas, oleh sebab itu anak berkebutuhan khusus sudah selayaknya mendapatkan kesempatan belajar yang sama dengan anak-anak regular pada umumnya. Di Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1986 telah dirintis pengembangan sekolah penyelenggaraan

[41] Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan…, 14.
[42] *Ibid*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan inklusi yang melayani Penuntasan Wajib Belajar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.[43]

4. Karakteristik pendidikan inklusi

Menurut Budiyanto, karakteristik yang terpenting dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah suatu komunitas yang kohesif dimana sekolah harus menerima dan responsive terhadap kebutuhan individual setiap peserta didik.[44] Shapon-Shevin dalam Budiyanto mengemukakan lima profil pembelajaran di sekolah inklusi, meliputi[45]:

a. Pendidikan inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keberagaman, dan menghargai perbedaan.
b. Penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.
c. Pendidikan inklusi berarti mempersiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Perubahan kurikulum berkaitan erat dengan perubahan secara metode pembelajaran. Peserta didik bekerjasama, saling mengajar, dan secara aktif berpartisipasi dalam pendidikannya sendiri serta teman-temannya untuk saling belajar satu sama lain.
d. Pendidikan inklusi berarti menyediakan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus serta penghapusan hambatan yang berkaitan dengan

[43] Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan…, iii.
[44] Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusi Berbasis Budaya Lokal*, (Jakarta: Depdiknas, 2005), 157.
[45] *Ibid*,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isolasi profesi. Aspek yang paling penting dari pendidikan inklusi meliputi pengajaran dengan tim, kolaborasi, dan konsultasi serta berbagai cara mengukur ketrampilan, pengetahuan, dan bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak. Kerjasama tim sangat diperlukan antara guru dengan para profesional, ahli bina bahasa dan wicara, petugas bimbingan, dsb. Selain itu, guru juga memerlukan pelatihan dan dorongan sehingga kerjasama yang diinginkan dapat terwujud.

e. Pendidikan inklusi berarti melibatkan orang tua dalam proses perencanaan dan pendidikan inklusi sangat tergantung kepada masukan orang tua pada pendidikan anaknya, misalnya keterlibatan orang tua dalam penyusunan program pembelajaran individu.

Sementara itu, karakteristik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi terdiri dari beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber dan evaluasi yang dijelaskan sebagai berikut[46]:

a. Hubungan, Ramah dan hangat
b. Kemampuan guru dalam membina peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda.
c. Pengaturan tempat duduk, Pengaturan tempat duduk yang bervariasi.
d. Materi belajar, berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran.

[46] Lay Kekeh Marthan, *Manajemen Pendidikan Inklusi*…, 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sumber, guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak, contoh meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah didapat ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pelajaran tertentu.

f. Evaluasi, penilaian, observasi, portofolio yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai.

Dari pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi harus memiliki karakteristik lingkungan inklusi yang ramah terhadap pembelajaran seperti yang telah tercantum pada Depdiknas Tahun 2004 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan terpadu/inklusi yang digambarkan pada gambar dibawah ini[47]:

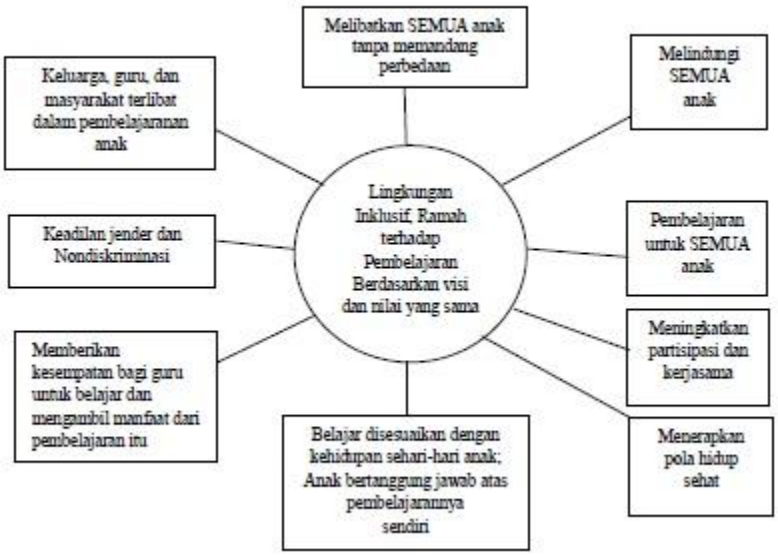

Gambar 2.1. Karakteristik Lingkungan Inklusi

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi semua komponen ikut terlibat dalam menciptakan lingkungan

[47] Depdiknas, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi*, (Jakarta: 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Antara guru, orang tua, dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menciptakan lingkungan tersebut untuk menciptakan suasana pembelajaran yang tidak saling membeda-bedakan baik menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, agama, dan sebagainya.

Sekolah dengan sistem pendidikan inklusi harus dapat memahami karakteristik setiap peserta didik yang memiliki perbedaan baik dari dari segi fisik, intelektual, emosional, maupun sosial. Namun dengan perbedaan tersebut sekolah harus dapat mengakomodasikan semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, emosional, maupun sosial agar tidak timbul unsur diskrimanasi.

C. Konsep Manajemen Peserta Didik pada Pendidikan Inklusi

Dalam mengoptimalkan layanan pendidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, dalam pengelolaannya diperlukan sistem manajerial sekolah/madrasah yang memperhatikan hal-hal berikut:

1. Sekolah menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian, baik yang berkaitan dengan peserta didik, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana serta penataan lingkungan.
2. Sekolah menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan.
3. Sekolah menyiapkan sistem pengelolaan kelas yang mampu mengakomodasi heterogenitas kebutuhan khusus peserta didik.
4. Guru memiliki kompetensi pembelajaran bagi semua peserta didik termasuk kompetensi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Guru memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan peran orang tua, tenaga professional, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komite sekolah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di sekolah.[48]

Dari beberapa hal yang perlu diperhatikan di atas, komponen yang menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan inklusi adalah peserta didik terutama peserta didik berkebutuhan khusus. Karena peserta didik berkebutuhan khusus merupakan alasan utama dibentuknya sistem pendidikan inklusi yaitu untuk menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan sehingga anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan peserta didik pada umumnya untuk mengenyam pendidikan di sekolah/madrasah regular tanpa membedakan peserta didik berdasarkan perbedaan fisik, kognitif, emosional ataupun motorik. Untuk mewujudkan pelayanan yang optimal terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut, diperlukan adanya pengelolaan manajemen peserta didik yang sistematis mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengevaluasian peserta didik. Sejalan dengan konsep *Education for All*, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi harus dapat memenuhi pelayanan yang lebih intensif kepada peserta didik berkebutuhan khusus, tanpa memandang perbedaan fisik, sosial, emosional, dan intelektualnya. Dalam manajemen peserta didik, terdapat beberapa ruang lingkup. Ruang lingkup manajemen peserta didik tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk peserta didik sejak awal peserta didik diterima di sekolah sampai peserta didik lulus dari sekolah, mulai dari

[48] Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan..., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian yaitu meliputi kegiatan: analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen/penerimaan peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi peserta didik, penempatan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan peserta didik, kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, serta evaluasi peserta didik. Lebih ringkasnya, uraian di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

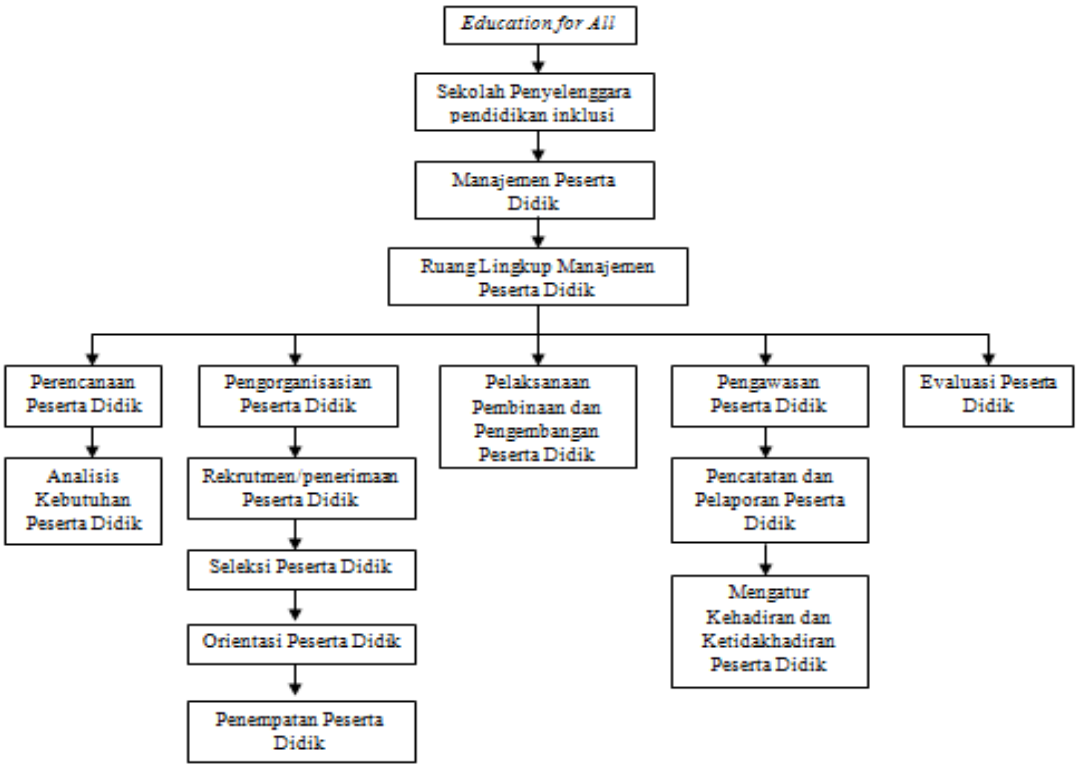

Gambar 2.2. Konsep Manajemen Peserta Didik pada Pendidikan Inklusi

Berikut penjelasan dari masing-masing ruang lingkup manajemen peserta didik pada pendidikan inklusi yang terdapat pada gambar di atas:

a. Perencanaan peserta didik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Badrudin, perencanaan peserta didik berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi peserta didik yang tidak dapat lepas kaitannya dengan pencatatan hasil belajar dan aspek-aspek dalam kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler.[49] Sementara itu, Ali Imron mengemukakan bahwa perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan penerimaan peserta didik sampai dengan kelulusan peserta didik.[50] Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan peserta didik merupakan suatu perencanaan yang dirancang bagi peserta didik sejak awal masuk sampai lulus dari lembaga pendidikan.

Di dalam perencanaan peserta didik mencakup kegiatan analisis kebutuhan peserta didik. Tim Dosen Kependidikan Islam UIN Sunan Ampel menjelaskan bahwa Analisis kebutuhan peserta didik, yaitu menentukan berapa jumlah siswa yang dibutuhkan oleh Lembaga Pendidikan Islam. Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini antara lain: merencanakan berapa jumlah siswa yang akan diterima serta menyusun program kegiatan kesiswaan.[51]

Dalam perencanaan peserta didik pada pendidikan inklusi, terdapat aktivitas analisis kebutuhan peserta didik, dalam hal ini setiap sekolah inklusi harus memberikan kesempatan dan peluang untuk peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat diterima di sekolahnya terutama peserta didik yang berada di sekitar

[49] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 31.
[50] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah…*, 21.
[51] Tim Dosen, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam…,* 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan sekolah berada. Hal ini berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, yang mengemukakan bahwa pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.[52] Selain itu sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusi harus mempersiapkan secara terperinci segala kegiatan peserta didik khususnya peserta didik berkebutuhan khusus sejak penerimaan siswa baru.

b. Pengorganisasian peserta didik

Setelah melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan peserta didik dalam perencanaan peserta didik, kegiatan selanjutnya adalah pengorganisasian peserta didik yang merupakan kegiatan pengelolaan peserta didik sebelum pendaftaran sampai diterima di sekolah/madrasah. Pengorganisasian peserta didik ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Rekrutmen/penerimaan peserta didik

Rekrutmen/penerimaan peserta didik pada hakikatnya proses pencarian, menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan, langkah-langkah kegiatan tersebut adalah: a. membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang melibatkan

[52] Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, *Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua unsur guru, pegawai TU (Tata Usaha), dan dewan sekolah/komite sekolah; b. Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Informasi yang harus ada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat lembaga, persyaratan pendaftaran siswa baru (syarat umum dan syarat khusus), cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.[53] Sedangkan menurut Tim Dosen Kependidikan Islam UIN Sunan Ampel, rekrutmen/penerimaan peserta didik, yaitu proses pencarian, menentukan serta menarik perhatian peserta didik dengan langkah-langkah sebagai berikut: pembentukan panitia penerimaan siswa baru, pembuatan dan pemasangan pengumuman. Secara keseluruhan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan rekrutmen/penerimaan siswa baru meliputi masalah kepanitiaan, pesyaratan calon peserta didik baru, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.[54]

Langkah-langkah rekrutmen/penerimaan peserta didik baru pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

a. Membentuk panitia. Panitian penerimaan peserta didik baru terdiri dari kepala sekolah dan beberapa guru yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, yakni syarat-syarat pendaftaran, formulir pendaftaran, pengumuman, buku pendaftaran, waktu pendaftaran, dan jumlah calon yang diterima.
b. Menentukan syarat pendaftaran calon peserta didik. Syarat pendaftaran calon peserta didik baru biasanya sudah ditentukan

[53] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 32.
[54] Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam…*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Menyediakan formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran dimaksudkan untuk mengetahui identitas calon peserta didik dan untuk kepentingan pengisian buku induk sekolah.
d. Pengumuman pendaftaran.
e. Menyediakan buku pendaftaran.
f. Menentukan waktu pendaftaran.[55]

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan peserta didik baru, diantaranya:

a. Kebijakan penerimaan peserta didik baru, harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada di sekolah (kondisi sekolah). Faktor kondisi sekolah tersebut meliputi: daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, prasarana dan sarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal di kelas satu, dan sebagainya.[56] Kebijakan penerimaan peserta didik juga memuat sistem pendaftaran dan seleksi atau penyaringan yang akan diberlakukan untuk peserta didik.
b. Sistem penerimaan peserta didik baru, yang dimaksud disini merujuk pada cara penerimaan peserta didik baru. Badrudin menjelaskan bahwa terdapat

[55] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 32-33.
[56] *Ibid*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua macam sistem penerimaan peserta didik baru. Pertama menggunakan sistem promosi sedangkan yang kedua menggunakan sistem seleksi.[57] Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik baru tanpa menggunakan seleksi, tetapi diterima begitu saja (tidak ada yang ditolak). Sistem seleksi digolongkan menjadi beberapa macam: a. Seleksi berdasarkan nilai UN; b. Berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan (PMDK/Jalur prestasi); c. Berdasarkan hasil tes masuk.[58]

c. Kriteria penerimaan peserta didik baru, kriteria disini digunakan sebagai patokan yang menentukan bisa tidaknya seseorang diterima sebagai peserta didik baru.

Terdapat tiga macam kriteria penerimaan peseta didik yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria acuan patokan (*standard criterion referenced*) yaitu suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Kriteria acuan norma (*norm criterion referenced*) yaitu status penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi.
3. Kriteria yang didasarkan pada daya tampung sekolah. Sekolah me-*ranking* prestasi peserta didik mulai yang paling tinggi sampai prestasi yang paling rendah sampai daya tampung tersebut dipenuhi.[59]

Rekrutmen/penerimaan peserta didik baru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada umumnya sama dengan sekolah reguler yaitu pembentukan panitia penerimaan siswa baru, pembuatan dan pemasangan

[57] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 38.
[58] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah…*, 43.
[59] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumuman namun terdapat beberapa aspek tambahan yaitu aspek identifikasi, *assessment*, dan penempatan peserta didik.[60] Ketiga aspek tersebut merupakan tahapan dalam proses penerimaan peserta didik baru berkebutuhan khusus. Tahap pertama yang harus dilakukan oleh sekolah/madrasah adalah proses identifikasi. Proses identifikasi merupakan tahap awal untuk mengetahui jenis kebutuhan khusus yang dimiliki oleh peserta didik baru. Seperti yang dikemukakan dalam pedoman umum penyelenggara pendidikan inklusi bahwa identifikasi merupakan proses penyaringan (*screening*) untuk menentukan jenis kebutuhan khusus peserta didik. Dalam melakukan proses identifikasi, sekolah/madrasah dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan bantuan guru yang ada di sekolah/madrasah ataupun bekerjasama dengan professional terkait dengan menggunakan alat/instrumentasi standar maupun nonstandar yang telah dikembangkan oleh guru atau professional terkait.[61]

Setelah tahap identifikasi selesai, tahapan selanjutnya yang dilakukan *assessment*, tahap ini merupakan suatu proses atau upaya mendapatkan informasi tentang hambatan-hambatan belajar dan kemampuan yang sudah dimiliki serta kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, agar dapat dijadikan

[60] Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, 2007.
[61] Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan..., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar dalam pembuatan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak.[62] Tujuan *assessment* menurut Marit Holm, antara lain sebagai berikut[63]:

a. Menemukan jenis gangguan, apakah peserta didik memiliki gangguan dalam bidang akademik atau yang lain.
b. Menganalisis pekerjaan peserta didik, maksudnya adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik yang mengalami gangguan, cara kerja, keterampilan, pemahaman, inisiatif, merefleksikan kemampuan.
c. Menganalisis bagaimana cara kerja peserta didik, maksudnya urutan, prosedur, cara pemecahan masalah, memecahkan soal, hubungan sosial, interaksi dengan lingkungan.
d. Menganalisis penyebabnya.
e. Memformulasikan hipotesis, memberikan kesimpulan, bagaimana cara kerja peserta didik, masalah-masalah peserta didik, cara kerja peserta didik.
f. Mengembangkan rencana intervensi, menyusun rencana, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut layanan.

Agar tahapan *assessment* dapat berjalan dengan optimal dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan maka dalam pelaksanaannya perlu melibatkan tenaga ahli terkait, seperti dokter, psikolog, pedagog, orthopedagog, dan profesi spesifik lain yang terkait. Secara khusus hasil *assessment* dapat

[62] Tarmansyah, *Inklusi Pendidikan untuk Semua*, (Jakarta: Dediknas, 2007), 183.
[63] *Ibid*, 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfungsi sebagai dasar perencanaan pembelajaran individual, sebagai dasar evaluasi dan monitoring, serta sebagai dasar pengalihtanganan (*referal*). Dalam pendidikan inklusi, penanganan lintas profesi menjadi keharusan, karena keragaman karakteristik peserta didik menuntut layanan lintas profesi yang professional, contohnya seperti seorang guru (pedagog) menemukan peserta didiknya mengalami hambatan dalam pengendalian emosi, maka guru tersebut mengalihtangankan penanganan emosi peserta didiknya kepada psikiater sehingga peserta didik mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya.[64]

2. Seleksi peserta didik

Tatang M. Amirin, dkk. mengemukakan bahwa seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.[65] Sementara itu, Meilina Bustari dan Tina Rahmawati menyebutkan bahwa seleksi peserta didik dilakukan apabila jumlah peserta didik yang diterima berdasarkan daya tampung tidak sebanding dengan pendaftar/peminat.[66] Dari beberapa pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa seleksi merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk

[64] Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan..., 16.
[65] Hega Raka Ardana, *Manajemen Peserta Didik Sekolah Inklusi ...,* 33.
[66] Meilina Bustari dan Tina Rahmawati, *Manajemen Peserta Didik*, (Yogyakarta: FIP UNY, 2005), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan diterima atau tidaknya pendaftar berdasarkan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Adapun cara-cara seleksi yang dikemukakan oleh Badrudin yang dapat digunakan adalah: a. Melalui tes atau ujian (tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademis, atau tes keterampilan); b. melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian; c. berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN.[67] Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Badrudin, Ali Imron juga mengungkapkan sistem seleksi digolongkan menjadi tiga macam yaitu seleksi berdasarkan daftar nilai Ebta Murni (DANEM), yang kedua seleksi berdasarkan Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), sedangkan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk.[68]

Setiap proses seleksi, peserta didik akan diterima sesuai kriteria kelulusan seleksi yang telah ditentukan oleh sekolah. Pada sekolah dasar, penentuan calon yang diterima pada sekolah dasar selain memenuhi persyaratan, lebih banyak terikat lagi pada daya tampung kelas.[69]

Dalam penyeleksian peserta didik pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, setiap peserta didik berkebutuhan khusus diseleksi berdasarkan prosedur menurut Pos Pendidikan Inklusif yaitu melalui sistem: (a) penerimaan peserta didik baru; (b) rujukan dari tenaga ahli yang relevan; (c)

---

[67] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 37.
[68] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah…*, 43.
[69] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rujukan dari lembaga lain; (d) mutasi atau melanjutkan dari sekolah lain; (e) program retrivel (pengembalian anak ke sekolah karena *drop out*).[70] Dalam lembaga pendidikan Islam, proses seleksi yang menekankan pada *the best input* lebih baik tidak perlu dilakukan, karena pada lembaga pendidikan Islam baik yang berada di lembaga yang baru berkembang maupun yang sudah maju, harus menekankan proses untuk mewujudkan hasil yang maksimal bukan hanya menekankan pada *input* tetapi dapat menerima peserta didik dari berbagai lapisan intelektual untuk kemudian diberdayakan secara maksimal untuk mencapai hasil maksimal pada ranah kognitif, afektif, psikomotorik, bahkan metakognitif.[71] Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan inklusi yang dalam sistemnya memberikan hak yang sama kepada peserta didik berkebutuhan khusus tanpa membedakan peserta didik berdasarkan kondisi fisik, motorik, intelektual, serta emosionalnya.

3. Orientasi peserta didik

Meilina Bustari dan Tina Rahmawati menyatakan bahwa orientasi merupakan kegiatan yang diwajibkan untuk peserta didik yang dinyatakan diterima di suatu sekolah. Orientasi dilakukan dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan kelas masing-masing, untuk mempersiapkan peserta didik secara fisik, mental, dan emosional dalam mengikuti pendidikan di

[70] Pos Pendidikan Inklusi, 2007.
[71] Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam…*, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah.[72] Sedangkan Ali Imron mengemukakan bahwa orientasi adalah perkenalan yang meliputi lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah.[73] Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa orientasi peserta didik merupakan kegiatan pengenalan situasi, kondisi, dan kultur sekolah kepada peserta didik agar peserta didik siap secara fisik, mental, emosional dalam menerima lingkungan baru yang ada di sekolah baru.

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk memberi nama kegiatan orientasi peserta didik (siswa) baru tersebut. Di antara nama kegiatan orientasi tersebut yaitu MOS (Masa Orientasi Siswa), MOPD (Masa Orientasi Peserta Didik), POS (Pekan Orientasi Siswa), dan MATSAMA (Masa Ta'aruf Siswa Madrasah).

Menurut Badrudin, tujuan orientasi bagi peserta didik adalah sebagai berikut[74]:

1. Agar peserta didik mengerti dan menaati peraturan yang berlaku di sekolah.
2. Agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah.
3. Agar peserta didik siap menghadapi lingkungan yang baru, baik secara fisik, mental, dan emosional sehingga merasa nyaman mengikuti proses pembelajaran.

---

[72] Meilina Bustari dan Tina Rahmawati, *Manajemen Peserta Didik…*, 29.
[73] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah…*, 73.
[74] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Agar peserta didik dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan sekolah.

Adapun fungsi orientasi peserta didik adalah sebagai berikut[75]:

1. Bagi peserta didik baru, orientasi peserta didik berfungsi sebagai wahana dalam memperkenalkan dirinya ke seluruh lingkungan sosial sekolah. Serta sebagai wahana untuk mengenal lingkungan baru yang ada di sekolah.
2. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan, orientasi peserta didik berfungsi untuk mengetahui serta mengenal peserta didik yang telah diterima di sekolah/madrasah.
3. Bagi peserta didik senior, orientasi peserta didik berfungsi untuk mengetahui lebih dalam tentang peserta didik penerusnya.

Orientasi peserta didik pada peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan sama seperti peserta didik normal lainnya. Hal ini berguna untuk mengenalkan peserta didik berkebutuhan khusus pada lingkungan baru yang ada di sekolah agar dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya.

4. Penempatan peserta didik

Badrudin mengemukakan bahwa penempatan peserta didik (pembagian kelas) yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas.[76] Pengelompokan peserta didik pada kelas (kelompok belajar) dilakukan sebelum peserta didik mengikuti proses pembelajaran.

[75] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah…*, 74-75.
[76] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelompokan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik yaitu jenis kelamin dan umur. Pengelompokan juga dapat didasarkan pada perbedaan individu peserta didik seperti minat, bakat, dan kemampuan.[77] Menurut Willian A. Jeager pengelompokan peserta didik dapat didasarkan pada fungsi integrasi dan fungsi perbedaan.[78] Fungsi integrasi yaitu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Pengelompokan integrasi ini didasarkan menurut jenis kelamin dan umur. Pengelompokan berdasarkan fungsi integrasi tersebut menghasilkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Fungsi perbedaan yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan pada perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik seperti minat, bakat, dan kemampuan. Pengelompokan berdasarkan fungsi perbedaan tersebut menghasilkan pembelajaran yang bersifat individual. Sejalan dengan hal tersebut, Tim Dosen UIN Sunan Ampel juga mengelompokkan penempatan peserta didik didasarkan pada fungsi[79]:

a. Integrasi, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan yang ada pada peserta didik misalnya kesamaan umur atau jenis kelamin. Pengelompakan seperti ini akan menghasilkan model pembelajaran klasikal.

[77] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 40.
[78] *Ibid,*
[79] Tim Dosen, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam…,* 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbedaan, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas perbedaan yang ada pada peserta didik, mulai dari perbedaan minat, bakat, serta kemampuan. Dengan pengelompokan ini akan menghasilkan model pembelajaran individual.

Pada sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusi setelah hasil identifikasi dan *assessment* didapat, tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penempatan/pengelompokkan peserta didik. Dalam penempatan peserta didik berkebutuhan khusus pada tahap awal, hendaknya setiap kelas inklusi dibatasi agar memudahkan pengelolaan kelas. Pada penempatan di setiap kelasnya peserta didik berkebutuhan khusus sebaiknya tidak lebih dari 2 (dua) jenis kekhususan, dan jumlah keduanya tidak lebih dari 5 (lima) peserta didik.[80] Hal ini untuk memudahkan GPK (Guru Pendidikan Khusus) dalam memonitoring perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di setiap kelas.

c. Pembinaan dan pengembangan peserta didik

Meilina Bustari dan Tina Rahmawati mengemukakan pembinaan peserta didik dilakukan agar siswa mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah.[81] Ach Suudy, mengemukakan bahwa pembinaan kesiswaan merupakan bagian yang sangat penting dalam terselenggaranya pelaksanaan pendidikan. Artinya, penyelenggaraan pendidikan

[80] Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, 2007.
[81] Meilina Bustari dan Tina Rahmawati, *Manajemen Peserta Didik…,* 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak lepas dari proses pembinaan kepada siswa, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.[82] Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan peserta didik merupakan usaha yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan guna mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan, serta keterampilan peserta didik dengan baik.

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah menyangkut aspek akademis dan nonakademis yang dilakukan dalam bentuk kegiatan kurikuler ataupun ekstrakurikuler, melalui berbagai program kegiatan yang sistematis dan sistemik. Dengan upaya seperti itu, peserta didik diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang utuh hingga seluruh modalitas belajarnya berkembang secara optimal.

Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan pengetahuan dan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupan di masa depan yang akan datang. Lembaga pendidikan mengadakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dalam rangka membina dan mengembangkan peserta didik.

Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang telah ditentukan di dalam kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan pada jam-jam pelajaran.[83] Kegiatan kurikuler dilakukan melalui pelaksanaan pembelajaran setiap mata pelajaran atau bidang

[82] Hega Raka Ardana, *Manajemen Peserta Didik Sekolah Inklusi…,* 38.
[83] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

studi di sekolah/madrasah. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan kurikuler tersebut. Sedangkan menurut Rusman, pelaksanaan kegiatan kurikuler/pembelajaran untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru harus memperhatikan hal-hal mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.[84]

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler menurut Badrudin dalam bukunya merupakan kegiatan peserta didik yang dilaksanakan di luar ketentuan yang ditentukan kurikulum tingkat satuan pendidikan.[85] Kegiatan ekstrakurikuler biasanya dilakukan dalam rangka merespons kebutuhan peserta didik dan menyalurkan serta mengembangkan hobi, minat, dan bakat peserta didik. Meilina Bustari dan Tina Rahmawati menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam-jam pelajaran dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler secara potensial memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan dirinya.[86] Sedangkan menurut Aldjon Dapa, dkk kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang secara kurikuler tidak diatur, akan tetapi perlu dilaksanakan dalam rangka mempertinggi rasa sosial keagamaan, sosial budaya, pengembangan kegemaran, ataupun dapat berupa kepramukaan, kelompok atau regu kesenian, olahraga dan kesehatan.[87] Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan non kurikuler yang diatur

[84] Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 10-13.
[85] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 48.
[86] Meilina Bustari dan Tina Rahmawati, *Manajemen Peserta Didik…*, 46.
[87] Aldjon Dapa, dkk., *Manajemen Pendidikan Inklusi*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan, 2007), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedemikian rupa guna merespons kebutuhan peserta didik dan menyalurkan serta mengembangkan hobi, minat, dan bakat peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri yang ada di dalam dirinya diluar kegiatan kurikulernya.

Menurut Permendikbud No. 81A Tahun 2013, fungsi dan tujuan ekstrakurikuler meliputi :

a. Fungsi Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir.

1. Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan.
2. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial.
3. Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik.
4. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. [88]

b. Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler

Menurut Permendikbud No. 81A/ Tahun 2013, tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah:

1. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik.

[88] Permendikbud No. 81A Tahun 2013, *Tentang Implementasi Kurikulum.* 3. (diakses pada tanggal 17 Januari 2017 Pukul 10.15)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya.[89]

Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler harus dilaksanakan karena saling menunjang dalam proses pembinaan dan pengembangan kemampuan peserta didik diukur melalui proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan (oleh guru, pembina, instruktur, fasilitator, pelatih)

Dalam pengelolaan kegiatan pembinaan kurikuler pada peserta didik berkebutuhan khusus, sekolah harus mendesain kegiatan pembelajaran sebaik mungkin karena di dalam kelas tidak hanya akan ada peserta didik normal melainkan juga terdapat peserta didik berkebutuhan khusus. Pengelolaan yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran diantaranya adalah kegiatan pengelolaan tempat belajar/ruang kelas, pengelolaan bahan pelajaran, pengelolaan kegiatan dan waktu, pengelolaan siswa, pengelolaan sumber belajar dan pengelolaan perilaku mengajar. Dalam pengelolaan kelas, sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dapat melaksanakan sistem pengelolaan kelas sebagai berikut[90]:

1. Kelas regular penuh, pada kelas ini peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama peserta didik regular.
2. Kelas regular dengan Guru Pembimbing Khusus, dalam kelas ini peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik reguler

[89] Permendikbud No. 81A Tahun 2013, *Tentang Implementasi Kurikulum….* 3-4.
[90] Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan..., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun memperoleh layanan khusus dari guru/GPK. Selama pembelajaran, GPK berperan sebagai pendamping (mengarahkan dan membimbing) peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam pembelajaran.

3. Kelas khusus di sekolah reguler, dalam kelas ini peserta didik berkebutuhan khusus dipisahkan dari peserta didik reguler dan dibuatkan kelas tersendiri/terpisah. Peserta didik berkebutuhan khusus diikutsertakan di kelas reguler hanya untuk beberapa kegiatan/program pembelajaran tertentu.

Kegiatan pembelajaran dalam kelas inklusi harus tercipta suasana belajar yang kooperatif antara peserta didik normal dengan peserta didik berkebutuhan khusus.[91] Adapun desain pembelajaran yang dibutuhkan sekolah dalam *setting* inklusi adalah pembelajaran yang mampu mengembangkan metode dan pendekatan sesuai dengan kebutuhan anak.

Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler inklusi merupakan suatu kegiatan pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang diadakan di luar jam pelajaran, dengan tujuan memperluas pengetahuan siswa serta menyalurkan bakat dan minat peserta didik serta dalam rangka mempertinggi rasa sosial keagamaan, sosial budaya, pengembangan kegemaran, ataupun berupa kepramukaan, kesenian, olahraga dan kesehatan yang dilaksanakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi

[91] Hega Raka Ardana, *Manajemen Peserta Didik Sekolah Inklusi…*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus memperhatikan kebutuhan atau minat dari peserta didik sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi atau mengembangkan potensi yang dimilikinya.[92]

d. Pengawasan peserta didik

Dalam melaksanakan pembinaan, sekolah/madrasah perlu melaksanakan pengawasan terhadap peserta didik guna mengontrol perkembangan peserta didik, serta kedisiplinan peserta didik. Dalam kegiatan pengawasan tersebut terbagi dalam dua ruang lingkup, yaitu:

1. Pencatatan dan pelaporan peserta didik

Badrudin dalam bukunya menjelaskan bahwa pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai peserta didik tamat atau meninggalkan sekolah.[93] Meilina Bustari dan Tina Rahmawati mengemukakan bahwa setelah peserta didik diterima di suatu sekolah, kegiatan selanjutnya yang dilakukan sekolah adalah mencatat data atau informasi mengenai peserta didik.[94] Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pelaporan peserta didik dilakukan sejak peserta didik diterima di sekolah sampai tamat dari sekolah, catatan yang dilakukan berupa seluruh data dari setiap peserta didik baik data pribadi, maupun data prestasi peserta didik.

Pencatatan peserta didik bertujuan agar lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal terhadap peserta didik. Pelaporan peserta didik

[92] Hega Raka Ardana, *Manajemen Peserta Didik Sekolah Inklusi …*, 49.
[93] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 41.
[94] Meilina Bustari dan Tina Rahmawati, *Manajemen Peserta Didik…*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga agar pihak-pihak terkait dapat mengetahui perkembangan peserta didik di lembaga tersebut. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung pencatatan dan pelaporan peserta didik adalah buku induk siswa, buku klapper, daftar presensi, buku catatan pribadi peserta didik, daftar mutasi peserta didik, daftar nilai, buku leger, dan buku rapor.[95]

Pencatatan dan pelaporan bagi peserta didik khususnya bagi anak yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusi sangat dibutuhkan guna untuk mengetahui data-data peserta didik yang berkebutuhan khusus seperti psikologisnya, jenis kebutuhan khusus yang ada pada peserta didik dan perkembangan anak tersebut. Hal ini sangat berguna dalam memberikan pengawasan terhadap perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolah/madrasah inklusi.

2. Kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik

Kehadiran peserta didik di sekolah merupakan hal yang sangat penting karena aktivitas belajar mengajar di sekolah dapat berlangsung jika peserta didik hadir di sekolah untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Kehadiran peserta didik di sekolah (*school attendence*) adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah

[95] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 41-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada jam-jam efektif di sekolah.[96] Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan sekolah.[97]

Pada sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusi, sudah seharusnya juga diatur tentang kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, hal ini untuk membatasi ketidakhadiran yang dilakukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Karena semakin sering peserta didik tidak hadir, peserta didik akan semakin sulit untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik berkebutuhan khusus tersebut.

e. Evaluasi peserta didik

Menurut Wand dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.[98] Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.[99] Sedangkan menurut Ali Imron, evaluasi hasil belajar peserta didik adalah suatu proses menentukan nilai prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya.[100] Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik adalah suatu proses

[96] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah…*, 82.
[97] *Ibid*, 83.
[98] Syaiful Djamarah dan Aswan Zain, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 57.
[99] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 61.
[100] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah…*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menilai hasil belajar peserta didik dalam seluruh kegiatan peserta didik yang ada di sekolah. Pasaribu dan Simanjuntak, menyatakan bahwa[101]:

Tujuan umum evaluasi peserta didik adalah:

a. Mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
b. Memungkinkan pendidik/guru menilai aktivitas/pengalaman yang didapat.
c. Menilai metode mengajar yang digunakan.

Tujuan khusus evaluasi peserta didik adalah:

a. Merangsang kegiatan peserta didik.
b. Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan belajar peserta didik.
c. Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan untuk memperbaiki mutu pembelajaran/cara belajar dan metode mengajar.

Sedangkan menurut Sahertian, fungsi evaluasi peserta didik adalah sebagai berikut[102]:

a. Untuk memberikan motivasi terhadap hal belajar mengajar.
b. Untuk melengkapi informasi mengenai kemajuan belajar dan kemunduran peserta didik. Dapat pula digunakan untuk pertimbangan kenaikan kelas.
c. Untuk menentukan murid dalam suatu kemajuan.
d. Untuk memperoleh data bagi pekerjaan bimbingan dan penyuluhan.

---

[101] Syaiful Djamarah dan Aswan Zain, *Psikologi Belajar…*, 58.
[102] *Ibid*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi evaluasi peserta didik adalah untuk mengetahui perkembangan peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah baik dalam kegiatan kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Berdasarkan tujuan penilaian hasil belajar tersebut, ada beberapa fungsi penilaian yang dapat dikemukakan antara lain[103]:

1. Fungsi selektif, guru dapat melakukan suatu seleksi atau penilaian terhadap peserta didik dengan melakukan suatu evaluasi.
2. Fungsi diagnostik, dengan melakukan evaluasi guru dapat mengetahui kelemahan peserta didik. Sehingga akan lebih mudah dalam mencari cara mengatasinya.
3. Fungsi penempatan, dengan evaluasi guru akan lebih mudah dalam menempatkan peserta didik di dalam kelompok kelasnya.
4. Fungsi pengukur keberhasilan program, dengan evaluasi peserta didik makan akan diketahui sampai mana keberhasilan penerapan program pembelajaran.

Dalam melakukan evaluasi, diperlukan suatu teknik evaluasi. Teknik adalah suatu cara yang dapat ditempuh oleh seseorang dalam melakukan sesuatu. Secara garis besar terdapat dua macam teknik evaluasi, yaitu tes dan nontes.[104] Tes adalah penilaian yang komprehensif terhadap seorang individu atau keseluruhan usaha evaluasi program. Dalam suatu kelas, tes memiliki dua fungsi ganda, yaitu

[103] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 61.
[104] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah…*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengukur keberhasilan peserta didik dan untuk mengukur keberhasilan program pengajaran.[105] Dalam penggunaan teknik tes, sebaiknya guru tidak hanya menggunakan tes objektif saja, melainkan juga menggunakan tes uraian. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur keberhasilan peserta didik, terdapat tiga jenis tes, yaitu[106]:

1. Tes diagnostik, merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan peserta didik sehingga dapat ditemukan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan dapat diberikan penanganan yang tepat.
2. Tes formatif, merupakan jenis tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah berkembang setelah mengikuti program sekolah. Jenis tes ini berfungsi untuk memberikan informasi bagi guru, apakah pembelajaran yang diberikan telah berhasil atau belum.[107]
3. Tes sumatif, merupakan tes yang dilaksanakan pada akhir periode tertentu.[108] Tes ini berfungsi untuk menentukan angka kemajuan hasil belajar peserta didik.

Sedangkan yang termasuk dengan teknik nontes adalah: observasi, wawancara, angket, sosiometri, *anecdotal record*, dan skala penilaian.[109]

---

[105] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 62.
[106] *Ibid*, 62-63.
[107] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah…*, 121.
[108] *Ibid*, 122.
[109] *Ibid*, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil evaluasi terhadap peserta didik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik. Terdapat dua program untuk menindaklanjuti hasil evaluasi peserta didik, yaitu:

1. Program remedial, Badrudin menjelaskan untuk menangani kesulitan belajar peserta didik, guru dapat melakukan pendekatan pengajaran remedial. Pengajaran remedial adalah suatu bentuk khusus pengajaran yang ditujukan untuk menyembuhkan atau memperbaiki sebagian atau keseluruhan kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik.[110] Terdapat beberapa metode dalam pelaksanaan pengajaran remedial, diantaranya[111]:
   a. Metode pemberian tugas
   b. Metode diskusi
   c. Metode Tanya jawab
   d. Metode kerja kelompok
   e. Metode tutor teman sebaya
   f. Pengajaran individual
2. Program pengayaan, merupakan kegiatan yang diberikan kepada peserta didik kelompok cepat sehingga peserta didik tersebut menjadi lebih kaya pengetahuan dan keterampilannya atau lebih mendalami bahan pelajaran yang sedang mereka pelajari.[112]

[110] Badrudin, *Manajemen Peserta Didik…*, 64.
[111] *Ibid*, 68.
[112] *Ibid*,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Evaluasi pada peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kemajuan belajar peserta didik berkebutuhan khusus selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembinaan di sekolah/madrasah. Evaluasi yang diberikan kepada peserta didik di sekolah inklusi juga disesuaikan dengan kemampuan dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Proses evaluasi meliputi tahapan perencanaan, pengumpulan informasi disertai bukti pencapaian hasil belajar, pelaporan, dan penggunaan informasi hasil belajar peserta didik. Penilaian/evaluasi meliputi penilaian proses dan produk. Prosedur penilaian meliputi penilaian tertulis, sikap, kinerja/produk, portofolio, proyek, dan unjuk kerja (*performance*). Dalam pedoman umum penyelenggara pendidikan inklusi dijelaskan penilaian peserta didik inklusi ini mengacu pada model pengembangan kurikulum yang dipergunakan, yaitu:

1. Apabila menggunakan model kurikulum reguler penuh (kurikulum Standar Nasional), maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian yang berlaku pada sekolah reguler.
2. Jika menggunakan model kurikulum reguler (kurikulum Standar Nasional) dengan modifikasi maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian reguler yang telah dimodifikasi sekolah disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3. Apabila menggunakan kurikulum PPI (Program Pembelajaran Individual), maka penilaiannya bersifat individu dan didasarkan pada kemampuan dasar (*baseline*).[113]

[113] Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta 2011 ..., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk laporan hasil belajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, pada pedoman umum penyelenggara pendidikan inklusi dijelaskan bahwa:

1. Peserta didik yang menggunakan kurikulum Standar Nasional, laporan hasil belajar (raport) menggunakan model raport umum yang berlaku.
2. Peserta didik yang menggunakan kurikulum Standar Nasional dengan modifikasi, maka model raport menggunakan raport umum yang dilengkapi dengan narasi dan portofolio yang menggambarkan kualitas kemajuan belajar.
3. Peserta didik yang menggunakan PPI (Program Pembelajaran Individual), model raport yang digunakan model raport kuantitatif dengan narasi dan portofolio. Penentuan nilai kuantitatif didasarkan pada kemampuan dasar awal (*baseline*).[114]

Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Penerimaan peserta didik baru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah terdekat. Selain diselenggarakan pada sekolah reguler, pendidikan inklusi juga mulai diselenggarakan di madrasah. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 dijelaskan bahwa madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan menteri agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam. Madrasah Ibtidaiyah merupakan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri

[114] Pos Pendidikan Inklusi, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan pengertian dari madrasah, tentunya sistem pendidikan inklusi yang diterapkan pada madrasah harus dikemas berdasarkan kekhasan agama Islam sesuai tujuan dari sebuah madrasah itu sendiri. Kekhasan agama Islam tersebut pastinya ditujukan pada setiap peserta didik yang ada di madrasah termasuk untuk anak berkebutuhan khusus yang telah diterima di madrasah. Dengan kekhasan sebuah madrasah tersebut diharapkan setiap peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus mampu berkembang dengan baik sesuai nilai-nilai keagamaan yang lebih intensif diterapkan di madrasah. Karena sebuah madrasah memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh sekolah reguler yaitu[115]:

1. Suasana kehidupan madrasah yang agamis.
2. Adanya sarana ibadah.
3. Penggunaan metode dan pendekatan yang agamis.
4. Kualifikasi guru yang harus beragama Islam dan berakhlaq mulia.

Sehingga madrasah inklusi jika dikembangkan dengan baik, harusnya bisa jauh lebih unggul daripada sekolah inklusi reguler pada umumnya. Karena dengan ciri khasnya tersebut, sebuah madrasah memiliki kemampuan untuk menjadi wahana pembinaan ruh dan praktik hidup islami, sehingga sangat cocok dalam mengembangkan potensi peserta didik berkebutuhan khusus.

[115] Agus Maimun dan Agus Zaenul Fitri,*Madrasah Unggulan: Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id